

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

15 (Lima Belas) Hari Kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

## DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

## LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Usulan Rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Surat Permohonan Kepala Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

## PERSYARATAN

1. File Surat Permohonan Pinjaman dari Kepala Daerah;
2. File Persetujuan DPRD dilengkapi dengan Risalah Sidang;
3. File Salinan Berita Acara Pelantikan Gubernur, Bupati atau Walikota;
4. File Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah;
5. File KAK;
6. File Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
7. File Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA T-1) \*Audited BPK;
8. File Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA T-2) \*Audited BPK;
9. File Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA T-3) \*Audited BPK;
10. File KUA PPAS APBD T+1;
11. File Rancangan APBD T+1;
12. File Perbandingan sisa pinjaman ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
13. File APBD/P-APBD Tahun berkenaan;
14. File Rencana Keuangan Pinjaman;
15. File Lampiran XIII PERDA APBD T+1;
16. File RPJMD;
17. File RKPD T+1; dan
18. File Surat Penawaran.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

# PERTIMBANGAN PINJAMAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KEUANGAN DAERAH

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

